

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejarah mencatat bahwa surat kabar memiliki peranan yang sangat penting dalam laju informasi di Indonesia. Bahkan sampai dengan saat ini surat kabar menjadi salah satu media yang digunakan masyarakat guna mendapatkan informasi teraktual. Selain itu, ditinjau dari kegunaan lainnya, surat kabar memiliki peranan penting selama proses menjelang kemerdekaan Indonesia. Kontribusi besar surat kabar sebagai media informasi pada saat penjajahan colonial yaitu ikut serta berkontribusi dalam menyebarkan harapan dan semangat perjuangan.

Sejak awal kemunculannya surat kabar Indonesia memiliki ciri yang berbeda dengan surat kabar di negara lain, hal ini dibuktikan dengan adanya kekedeatan dalam konten atau isi surat kabar, yang mana bisa dikatakan surat kabar Indonesia memiliki kedekatan antara kebudayaan, masyarakat dan politik. Hal tersebut berpengaruh tentunya terhadap perkembangan surat kabar di Indonesia yang beragam. Berkenaan dengan munculnya beragam surat kabar, maka bisa dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan akan informasi akan berbeda sesuai dengan koridor yang dibutuhkan oleh masing-masing masyarakat.

Pada masa pergerakan nasional, pers menjadi alat propaganda para pejuang kemerdekaan untuk dapat mengumpulkan dan menginformasikan perjuangan mereka. Surat kabar pasca kemerdekaan dan memasuki era Demokrasi Terpimpin mengalami perubahan, semangat yang menjiwai perjuangan kemerdekaan mulai memudar, terjadi surat kabar angin antar kekuatan politik. Media pers di Indonesia sendiri terbagi kedalam beberapa jenis diantaranya ialah surat kabar, radio, kantor berita, serta televisi, yang mana ini menjadi bagian penting sebagai institusi sosial dan berfungsi untuk memberikan informasi berupa *news and views* (berita dan opini) kepada khalayak masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan fungsi tersebut, lembaga pers sering dipandang sebagai kekuatan demokrasi ke-4, disamping lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Suwirta, 2008, hlm. 48). Berkaitan dengan itu, pers menjadi alat komunikasi yang penting bagi Politik Indonesia. Mangutip pendapatnya Heywood, (2007, hlm.16) menjelaskan bahwa politik

dijelaskan bagian dari kegiatan yang memiliki tujuan seperti mempertahankan Negara, mengamandemenkan setiap kebijakan atau peraturan serta membuat atau merencanakan mengenai peraturan umum guna mengatur kehidupan masyarakat didalam suatu negara, dengan kata lain bahwa penjelasan dari Heywood secara tidak langsung mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan lepas dari gejala-gejala menuju konflik dan kerjasama.

Proses interaksi yang berlangsung antara pembuat kebijakan public dengan respon masyarakat akan selalu memunculkan konflik, baik itu konflik antar sesama individu, antar sesama kelompok atau bahkan antara individu dengan kelompok. Maka dengan begitu bahwa akan ada proses saling memengaruhi antara satu sama lain agar terciptanya kesepakatan yang sesuai dengan keinginan kelompok. Tanpa disadari pengertian dari pernyataan sebelumnya yaitu “pers menjadi alat komunikasi yang penting bagi Politik Indonesia” adalah pers menjadi alat komunikasi yang memiliki kerja sama untuk memberitakan hal-hal yang hanya disetujui atau yang menguntungkan pemerintah saja.

Pada saat kepemimpinan Soekarno pada tahun 1960-1965 yang dikenal juga dengan masa demokrasi terpimpin yang ditandai dengan adanya kekuasaan berpusat pada kebijakan Presiden Soekarno. Pers dikontrol sangat ketat dan menjadi penurut melalui upaya dari konsolidasi pada era kedudukan Soekarno, yang berarti pers memiliki peranan penting terhadap Indonesia. pada 12 Oktober 1960, dalam kapasitasnya sebagai Penguasa Perang Tertinggi (Peperti), Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang mewajibkan setiap penerbitan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh SIT (Surat Izin Terbit) (Flournoy, 1989, hlm. 9). Suwirta, (2008, hlm. 61) memaparkan bahwa peraturan PEPERTI No.10 Tahun 1960 yang dikeluarkan yaitu peraturan yang mewajibkan pers untuk memiliki surat keterangan mengenai permohonan izin penerbitan, dengan syarat harus menandatangani “19 Pernyataan” berisikan janji kepada pemerintah untuk senantiasa setia, mendukung, membela, taat, patuh, membantu, menjadi alat, tidak memuat berita sensasional dan menghina petinggi negara. Surat kabar yang tidak sepakat dengan peraturan pemerintah demokrasi terpimpin, memilih untuk tidak melanjutkan proses penerbitan atau dilarang terbit oleh pemerintah. Sementara bagi surat kabar yang ingin selamat, memilih tunduk pada peraturan pemerintah.

Pers itu diawasi dan harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, pada periode pemerintahan Soekarno, menurut Suwarta (2008, hlm. 62), kekuasaan Soekarno semakin efektif dan besar dalam kekuasannya, dengan kegemaran dirinya berpidato dan membuat akronim sehingga memunculkan berbagai slogan yang hebat, salah satu slogan paling dikenal oleh masyarakat yaitu nasakom atau yang berarti Nasionalis, Agama, dan Komunis. Soekarno menyebutkan bahwa Nasakom juga diperuntukkan dalam dunia pers. Adanya kebijakan Nasakom tersebut, maka pers ini pun memfasilitasi tentang isi dari pemberitaan tentang Nasakom. Menurut Seno, (2003, hlm. 222), hal ini menjadikan kalangan anggota fraksi dari Parkindo sering menyampaikan aspirasi tentang perlunya ada harian dari agama Kristen. Tujuannya adalah untuk dapat menyampaikan suara pemikiran-pemikiran Kristen di tengah masyarakat Indonesia, maka dari itu Surat kabar yang bernama Sinar Harapan hadir ditengah masyarakat.

Surat kabar ini mulai beredar dari tahun 1961. Edisi perdana Sinar Harapan dicetak sebanyak 7.500 eksemplar dan beredar Kamis sore, 27 April 1961 (Sihar & Karel, 2008, hlm. 973). Surat kabar ini adalah surat kabar harian umum yang bernapaskan kekristenan. Adapun pendiri Sinar Harapan berasal dari kalangan pendeta, tokoh gereja, aktivis Parkindo dan dewan gereja-gereja di Indonesia. Staff dan karyawan surat kabar Sinar Harapan yang berlatar belakang dan berlainan golongan bersama-sama membangun dan membentuk harian tersebut sehingga dapat diterima oleh kalangan pembaca di seluruh Indonesia (Katoppo & Rurambi, 1994, hlm. 155). Surat kabar ini dinilai kritis dan cepat tanggap dalam memberitakan suatu peristiwa, dan selama pemerintahan Soekarno surat kabar ini tidak bermasalah, surat kabar ini terus berkembang dan hadir untuk masyarakat hingga berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang kemudian digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia selanjutnya.

Moertopo (1973, hlm. 26) menyebutkan bahwa memasuki awal periode 1966 sampai dengan 1980 pers memasuki proses tahap konsolidasi orde baru dan kepemimpinan Soeharto dalam upaya menggulingkan posisi Soekarno. Sosok Soeharto hadir memerankan *actor* yang cukup penting dalam perubahan tatanan politik setelah peristiwa besar tahun 1965. Pemerintahan Soeharto berusaha

menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional setelah peristiwa 1965. Orde Baru adalah sebutan bagi masa kepemimpinan pemerintahan di bawah Soeharto sejak tahun 1966. Sejarah kekuasaan Orde Baru yang panjang secara langsung telah menempatkan Presiden Soeharto sebagai tokoh yang dipuja dan diakui sejalan dengan prestasi pembangunan ekonomi yang juga telah diukirnya (Suparno, 2012, hlm. 79). Masa Orde Baru ditandai dengan pembangunan di segala bidang dan dipelopori dengan banyaknya rencana bertahap yang dikenal dengan nama Repelita. Taufik (1977, hlm. 79) menyebutkan bahwa pers merupakan salah satu unsur dalam penggerak pembangunan. Pemerintah mengharapkan agar pers menjadi kawan pemerintah dalam mengarahkan pembangunan, yang jelas merupakan satu-satunya jalan untuk memperbaiki taraf kehidupan rakyat.

Pemerintahan Soekarno telah berakhir dan surat kabar Sinar Harapan mulai memasuki era baru yaitu era pemerintahan Presiden Soeharto. Memasuki era yang baru dalam perjuangan, surat kabar mempunyai kewajiban yang mulia dan lebih berat lagi. Perjuangan bangsa tidak lagi terbatas dan mulai adanya keterbukaan di tengah-tengah forum Internasional antar bangsa-bangsa. Pers berpegang teguh kepada falsafah Pancasila, yang tidak hanya menjamin tetapi memberi keleluasaan menggunakan hak untuk memenuhi kewajiban terhadap Tuhan, bangsa, dan manusia (Departemen Penerangan RI, 1978, hlm. 148). Negara Indonesia termasuk kedalam negara yang menghormati Hak-hak Asasi Manusia dengan memberi kebebasan kepada surat kabar seperti yang sudah tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 mencantumkan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”.

Pada masa pemerintahan Soeharto ini, awalnya pemerintah memberikan ruang bagi pers berupa kebebasan dalam lingkup nasional dibandingkan dengan pada masa kekuasaan Soekarno. Semma (2008, hlm. 109) menyebutkan bahwa Soeharto Kembali memulai era baru karena beberapa surat kabar yang amana pada pemerintahan Soekarno tidak memiliki surat izin edar atau bahkan dilarang oleh pemerintah, seperti *Merdeka*, *Pedoman*, dan *Indonesia Raya*. Meskipun kebebasandan keterbukaan pers telah kembali di buka, namun masih terdapat beberapa pengkekangan yang dilakukan pemerintah terhadap pers yang berorientasi pada sistem politik (kompasiana.com, 8 Februari 2020). Meskipun pada masa Orde

Baru adanya kemitraan antara pemerintah dengan pers, namun faktanya pemerintah tetap menjadi yang dominan. Pada pola hubungan semacam ini, fungsi kontrol pers terhadap pemerintah menjadi sangat lemah. Atmakusumah (2009, hlm. 24) menyebutkan bahwa bentuk lain dari kekuasaan negara atas media pers di tanah air adalah munculnya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Ketatnya pengawasan atas fungsi pers, pers yang harusnya sebagai transmisi informasi obyektif pada masa itu tidak dapat dirasakan.

Pada masa Orde Baru hanya surat kabar milik tentara, kaum nasionalis, kaum agama, dan kelompok independen yang diizinkan terbit, antara lain: (1) surat kabar militer diantaranya ialah: *Angkatan Bersenjata, Berita Yudha, Ampera, Api Pancasila*, dan *Pelopor Baru*; (2) surat kabar nasionalis: *Sulus Marhaen, El Bahar*, dan *Warta Harian*; (3) surat kabar Islam: *Duta Masyarakat, Angkatan Baru, Suara Islam* dan *Mercusuar*; (4) surat kabar Kristen: *Kompas* dan *Sinar Harapan*. Pembatasan pers juga diterapkan oleh pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru. Surat kabar yang dianggap berbahaya dan tidak sejalan dengan tujuan pemerintah akan dibredel, terlebih surat kabar yang menyinggung Soeharto dan kelompok-kelompoknya (Kompasiana.com, 8 februari 2020).

Padiatra (2015, hlm. 115-116) menyebutkan bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah penertiban atas pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh pers, antara lain menertibkan pemberitaan-pemberitaan dalam pers nasional atau bisa disingkat dengan nama pembredelan. Merujuk pada Undang-Undang No.11 tahun 1966 Pasal 3 kemudian disempurnakan kembali dalam Undang-Undang No.21 Tahun 1982 mengenai ketetapan pers menjelaskan bahwa pers pada dasarnya memiliki hak-hak kebebasan seperti halnya kontrol, kritik, dan koreksi yang bersifat korektif, dan konstruktif. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diartikan bahwa media massa memiliki suatu kebebasan dalam mengeluarkan pendapatnya. Akan tetapi media massa di masa Orde Baru nyatanya harus berhati-hati agar terhindar dari senjata pemerintah untuk mencabut surat izin terbitnya serta pers harus menjadi mitra pemerintah sambil terus melancarkan kritik terhadap pemerintah (Mallarangeng, 2010, hlm. 119).

Salah satu surat kabar yang beredar dan berkembang di Indonesia dan cukup terkenal pada masa Orde Baru adalah *Sinar Harapan*. Motto *Sinar Harapan* yaitu

“Memperjuangkan Kemerdekaan dan Keadilan, Kebenaran dan Perdamaian berdasarkan Kasih” yang dijalankan secara konsisten oleh pengelola *Sinar Harapan*. Konsekuensi dari konsistensi jajaran *Sinar Harapan* menjalankan motto, maka *Sinar Harapan* harus mengalami beberapa kali pembredelan oleh pemerintah (tribunnews.com, 2016). Surat kabar *Sinar Harapan* yang masih hadir untuk masyarakat hingga masa Orde Baru ini dikenal begitu berani dalam memberikan kritik terhadap pemerintah dan dinilai pandai dalam mencari informasi dan sangat cerdas dalam mensiasati penulis berita. *Sinar Harapan* dikenal juga sering mendapatkan beberapa kali pembredelan dari pemerintah mulai dari tahun 1965, 1970, 1972, 1973, 1974, 1978, dan 1986. Pembredelan yang tidak hanya terjadi satu kali tersebut, tidak membuat *Sinar Harapan* menjadi patah semangat untuk memberikan berita seputar pemerintah. Suwirta (2000, hlm. 209) menyebutkan bahwa media massa sejak awal masa kelahirannya tidak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakat Indonesia, dengan begitu media massa sesungguhnya bukan saja sebagai saksi sejarah yang aktual pada zamannya, tetapi juga turut melibatkan diri dan memberi arah dan pandangan pada masyarakat agar sesuai dengan jiwa zaman yang dicita-citakan. Artinya media massa memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan perpolitikan suatu bangsa. Media massa juga diharapkan dapat menjadi penyeimbang antara kepentingannya di satu pihak dan dilain pihak dengan kepentingan publik.

Berdasarkan pemaparan di atas, ada beberapa alasan yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan surat kabar dalam pusaran politik (kajian-kajian surat kabar *Sinar Harapan* 1961-1986). Pertama, pers yang gunanya adalah alat komunikasi yang bebas dalam berpendapat namun didalam sebuah pemerintahan, pers dijadikannya secara tidak langsung dikontrol dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlaku sesuai zaman yang sedang berkuasa. Kedua, penulis memilih *Sinar Harapan* karena surat kabar ini adalah surat kabar yang lahir di masa Orde Lama dan mampu bertahan hingga masa Orde Baru dengan tidak mengubah motto dari surat kabar tersebut meskipun jaman dan kebijakannya telah berbeda. Ketiga, peneliti melihat surat kabar ini dikenal sebagai salah satu surat kabar yang berani mengkritisi pemerintah dan dinilai pandai dalam mencari informasi dan sangat cerdas dalam mensiasati penulis berita. Keempat,

setelah melewati dua jaman pemerintahan yang berbeda serta dengan kebijakan pemerintah yang berbeda pula, pada akhirnya surat kabar ini harus berakhir ditahun 1986 dengan dicabutnya SIUPP secara permanen oleh pemerintah dan dinyatakan dalam surat keputusan Menteri penerangan No.8/Ditjen PPG/K/1986, yang ditandatangani dirjen pembinaan pers dan grafika, Sukarno Sinar Harapan, atas nama Menteri penerangan. Dengan demikian menjadi menarik untuk diteliti tentang permasalahan tersebut.

Penulis membatasi angka tahun 1961 – 1986. Penulis memilih angka tahun 1961 karena tahun tersebut adalah awal dari Sinar Harapan mulai terbit di pasaran. Lalu peneliti membatasi sampai tahun 1986 dimana pada tahun tersebut berakhirnya Sinar Harapan dengan dicabutnya SIUPP secara permanen oleh pemerintah dan dinyatakan dalam surat keputusan Ditjen PPG/K/1986. Selain itu, pada rentang tahun tersebut adanya masa yang berbeda dan kebijakan yang berbeda juga dari pemerintah. Dengan demikian keresahan penulis dalam penulisan skripsi ini ingin menguraikan bagaimana perkembangan surat kabar Sinar Harapan pada rentang waktu tersebut. Maka dari itu penulis akan mengkaji lebih dalam tentang apa yang telah penulis jelaskan diatas.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti membatasi kajiannya dalam pokok permasalahan pada “Perkembangan Surat Kabar Dalam Pusaran Politik (Kajian-Kajian Surat Kabar Sinar Harapan pada tahun 1961-1986)”. Selain daripada itu, untuk memudahkan mengarahkan dalam pembahasan penelitian, peneliti telah merumuskan beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pers Indonesia tahun 1961-1986?
- 2) Bagaimana berdirinya surat kabar Sinar Harapan?
- 3) Bagaimana proses pembredelan surat kabar Sinar Harapan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu :

- 1) Mendeskripsikan kebijakan Pemerintah terhadap pers pada tahun 1961-1986.
- 2) Mendeskripsikan awal mula berdirinya surat kabar Sinar Harapan di Indonesia tahun 1961.
- 3) Mendeskripsikan bentuk dan alasan pemerintah dalam pembredelan surat kabar serta sikap Sinar Harapan dalam menghadapi kebijakan pembredelan dari pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini:

1. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan sejarah khususnya untuk mata kuliah sejarah Indonesia masa awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin dan mata kuliah Orde Baru.
2. Memperkaya penulisan sejarah dalam rangka mengembangkan wawasan yang berkaitan dengan Sejarah Indonesia dalam sebuah media massa terutama surat kabar.
3. Menambah wawasan tentang surat kabar *Sinar Harapan*.
4. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap departemen Pendidikan Sejarah.

1.5 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi

Bab I Pendahuluan, bagian pertama ini peneliti memaparkan latar belakang penelitian beserta landasan fundamen mengenai penelitian yang akan diteliti. Pada bagian pertama ini pula peneliti mencoba mengungkapkan mengenai ketertarikan peneliti mengenai hal unik dan urgensi penulisan penelitian dalam memilih topik atau tema besar yang akan diteliti. Untuk dapatt menguraikan secara spesifik pembahasan, maka peneliti pada bab ini juga akan memaparkan beberapa poin meliputi; rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini diisi dengan mendeskripsikan landasan teori sebagai landasan analisa peneliti, sumber berupa buku, Jurnal baik itu yang berupa

fisik and digital digunakan peneliti sebagai bahan rujukan utama yang sekiranya menurut peneliti itu relevan untuk digunakan untuk kepentingan penelitian. Pada bab ini juga akan dikemukakan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian.

Bab III Metode Penelitian, pada bab penulis menjelaskan mengenai berbagai macam cara yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian. Proses yang dimulai dengan mengumpulkan sumber dan berkunjung ke tempat-tempat yang sekiranya ada sumber untuk menunjang penelitian sampai dengan proses penulisan hasil penelitian dalam bentuk historiografi. Hal ini penulis lakukan guna menemukan sumber yang bisa dikatakan relevan dengan masalah yang akan diteliti. Proses pada bab III ini diantaranya ialah pencarian sumber atau Heuristik yang mana pada proses heuristik ini merupakan proses mencari dan mengumpulkan data yang akan diperlukan. Kemudian peneliti melakukan Kritik, pada proses ini terbagi menjadi dua bagian yakni kritik internal dan kritik eksternal. Secara definisi umum proses kritik ialah proses pengujian mengenai kredible atau ketepatan dari sumber yang telah didapatkan. Tahap selanjutnya peneliti melakukan interpretasi, yang mana ini adalah proses penafsiran terhadap fakta yang telah dikemukakan berdasarkan pada sumber yang telah digunakan. Tahap akhir dari penelitian yang harus peneliti lakukan ialah proses historiografi, secara harfiah historiografi dijelaskan sebagai kegiatan penulisan akhir dengan cara menuliskan atau menginformasikan penelitian yang didapatkan guna mengedukasi khalayak luas berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan.

Bab IV isi penelitian atau pembahasan inti, pada bagian bab IV ini merupakan terpenting dari penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, sebab pada bab IV ini berisi mengenai bahasan tema utama serta jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan pada poin rumusan masalah. Bagian ini pula penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dimulai pada tahap mengolah data serta analisis yang telah dilakukan terhadap fakta yang ditemukan.

Bab V Simpulan serta Rekomendasi penelitian, Bab V ini merupakan bagian terakhir dalam serangkaian penulisan karya ilmiah skripsi ini, pada bagian V ini penulis memberikan analisis beserta dengan temuan fakta yang didapatkan. Selanjutnya akan disajikan dan diinformasikan bentuk tulisan berupa simpulan

serta rekomendasi. Bagian rekomendasi biasanya penulis akan merekomendasikan kepada peneliti-peneliti jika memang ada penelitian selanjutnya karya ilmiah ini bisa menjadi bahan rujukan serta bahan sumber untuk selanjutnya.